

✓ 300009397 3141 - 4

Ketua Peneliti :

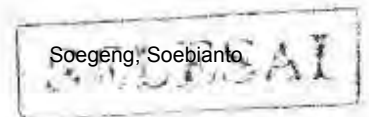
Soebianto Soegeng, S.H.

FAKULTAS EKONOMI



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh : DIP OPF Unair 1996/1997
SK.Rektor Nomor : 6229/J03/PL/1996
Nomor : 32





UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Puslit dan Pembanguan Regional | 4. Puslit Lingkungan Hidup | 8. Puslit Kependudukan dan Pembangunan |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 5. Puslit dan Pengembangan Gizi | 9. Puslit Bioenergi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 6. Puslit/Studi Wanita | 10. Puslit/Studi Kesehatan Reproduksi |
| | 7. Puslit Olahraga | |

Jl. Darmawangsa Dalam No. 2 Telp. (031) 5342322 Fax. (031) 5342322 Surabaya 60286

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

3000093973141

1. a. Judul Penelitian : Studi Tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah Pengguna Jasa Telekomunikasi
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, (V) Terapan, () Pengembangan
2. Kepala Proyek Penelitian
 - a. Nama Lengkap Dengan Gelar : Soebianto Soegeng, SH.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata/IIIc/130 541 787
 - d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
 - e. Fakultas/Jurusan/Puslit : Ekonomi/Manajemen
 - f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga
 - g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : 5 (lima) orang
4. Lokasi Penelitian : Kodya Surabaya, Malang, Pasuruan, dan Sidoarjo
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
 - a. Nama Instansi : -
 - b. Alamat : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000,000,00
8. Hasil Seminar Penelitian :
 - a. Dilaksanakan Tanggal : 19 Februari 1997
 - b. Hasil Penilaian : ~~() Baik Sekali~~ ~~() Baik~~
(V) Sedang () Kurang

Surabaya, 4 Maret 1997



Mengetahui/ Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini
NIP. 130 355 372

Judul Penelitian : *Studi tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah Pengguna Jasa Telekomunikasi*

Ketua Peneliti : Soebiato Soegeng, S.H.

Anggota Peneliti : Dra.Ec. Eva Kusuma Sundari, M.A.
Bambang Eko Afiatno
Drs.Ec. Tri Haryanto
Rudi Purwono, S.E.

Fakultas : Ekonomi Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP OPF Universitas Airlangga
SK. Rektor Nomor : 6229/ JO3.12/ PL/ 1996
Tanggal : 1 Agustus 1996

Isi Ringkasan:

Agar penggunaan telekomunikasi lebih merata karena memiliki arti penting dan strategis, dan untuk mengantisipasi akternahitas negatif, maka diperlukan instrumen fiskal daerah dalam bentuk pajak daerah bagi pengguna jasa telekomunikasi. Pertimbangannya adalah faktor regulasi dalam penggunaan jasa telekomunikasi. Selain itu, kegiatan pembangunan yang meningkat memerlukan dana semakin besar dan diperlukan kemandirian dana yang tercermin pada peningkatan pembiayaan pembangunan dari sumber dana daerah. Untuk itu, ditutamakan upaya meningkatkan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah jasa telekomunikasi.

Tujuan utama studi ini adalah peningkatan PAD Jawa Timur melalui usaha ekstensifikasi pajak daerah terhadap pengguna jasa telekomunikasi. Tujuan lainnya yaitu mengetahui dasar pengenaan, obyek, dan subyek pajak. Pada akhirnya, studi ini juga untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak, tarif yang harus dibayar, dan biaya pemungutan sehingga dapat diketahui perkiraan hasil bersih penerimaan pajak tersebut. Manfaat studi ini yaitu membantu pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan daerah dan membina para pengguna telekomunikasi. Studi ini hanya mengkaji pengenaan pajak daerah terhadap pengguna jasa telekomunikasi dasar di Jatim. Jenisnya meliputi telepon, telex, dan telegram yang penyelenggaraannya diserahkan kepada P.T. Telkom (dalam negeri) dan P.T. Indosat (luar negeri).

Ditinjau dari aspek teoritis, pengenaan pajak tersebut didasarkan oleh teori ekonomi mikro yang membahas tentang keseimbangan parsial umum dan ekonomi kesejahteraan, eksternalitas (externalities) positif maupun negatif, dan ekonomi penawaran melalui kurva Laffer. Selain itu, juga teori keuangan negara yang mengkaji fungsi pajak dengan fokus aspek regulasi. Aspek peraturan perundangan yang melandasi kebijakan tersebut meliputi Undang-Undang Darurat No. 11 Th. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-Undang No. 5 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 3 Th. 1989 tentang Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Obyek pajak bagi jasa telekomunikasi dasar adalah setiap penggunaan jasa telekomunikasi dasar di wilayah Jawa Timur. Penentuan subyek pajak yang paling sesuai yaitu menggunakan asas sumber. Oleh karena itu, subyek pajaknya adalah setiap orang/ badan yang memperoleh manfaat atas penggunaan jasa telekomunikasi dasar di Jawa Timur. Jadi, subyeknya adalah pengguna jasa telekomunikasi dasar di Jawa Timur. Pelaksanaan pemungutannya dikoordinasikan oleh beberapa instansi yaitu unsur Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor Wilayah Departemen Pos dan Telekomunikasi Jawa Timur, Kantor P.T. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur, Bank Jatim, dan bank-bank tempat pembayaran rekening telepon dan teleks.

Penggunaan jenis tarif proporsional merupakan pilihan yang tepat. Dasar perhitungan tarif yaitu menggunakan pulsa untuk telepon, teleks, dan kartu telepon sedangkan kata untuk telegram. Tarif jenis ini akan memenuhi asas keadilan pajak, di mana wajib pajak yang memperoleh manfaat (jumlah pulsa atau kata) lebih banyak akan membayar pajak lebih banyak pula.

Dengan analisis sensitivitas, maka untuk menetapkan tarif pajak dan biaya pemungutan tersebut dipilih Skenario 3-B. Artinya, skenario tarif pajak yang dipilih adalah Skenario 3 dengan tarif pajak sebesar 3% bagi kelompok bisnis (kelompok pelanggan jasa telepon bisnis dan teleks) dan sebesar 2% bagi kelompok non-bisnis (kelompok pelanggan jasa telepon residen terdiri dari rumah tangga, pemerintah, dan ABRI, sosial, TUK, dan telegram). Sebagai catatan bahwa untuk pelanggan dari instansi pemerintah dan ABRI tidak dikenakan pajak tersebut. Skenario biaya pemungutan yaitu Skenario B dengan biaya pemungutan sebesar 10% dari hasil pemungutan pajak tersebut. Dari data tahun 1994, maka estimasi hasil bersih pemungutan pajak tersebut dengan Skenario 3-B yaitu sekitar Rp 8 milyar. Pada akhirnya, proyeksi hasil bersih pemungutan pajak tersebut mulai tahun 1995 - 2000 menunjukkan bahwa pada tahun 1995 sekitar Rp 9,6 milyar dan tahun 2000 akan mencapai Rp 26,6 milyar.

Walaupun proyeksi hasil bersih pemungutan pajak daerah tersebut relatif besar, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Karena itu diperlukan studi lanjutan untuk jenis jasa telekomunikasi non-dasar yang mencakup telepon genggam, radio panggil (pager), internet, radio siaran naga (frekuensi MW dan FM), televisi, dan masih banyak jasa telekomunikasi lainnya yang belum tersentuh sebagai obyek pajak.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Akhir studi ini seperti yang telah direncanakan sejak awal. Namun, kami menyadari pula bahwa sebagai manusia biasa selalu tidak lepas dari segala kekhilafan maupun kesalahan, baik dalam hal teknis penulisan maupun materi studi. Untuk itu, kami sangat mengharapkan segala masukan dalam bentuk komentar ataupun kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tak langsung dengan hasil studi ini.

Studi ini tergolong jenis penelitian terapan di bidang keuangan negara dan perpajakan. Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan dan perencana pembangunan, khususnya di bidang keuangan negara dan perpajakan. Selain itu, diharapkan pula menambah perbendaharaan kajian ilmiah di bidang keuangan negara dan perpajakan.

Kami tidak dapat melupakan jasa berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan tahapan-tahapan studi ini sejak awal hingga selesai. Untuk itu, disampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta terima kasih atas kerjasamanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, khususnya Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan beserta staf, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan Kepala P. T. Telkom Wilayah Regional V Jawa Timur atas informasi yang diberikan.

Surabaya, 3 Maret 1997

Ketua Peneliti

Soebianto Soegeng, S.H.

NIP: 131 541 787

RINGKASAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pemikiran	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
1.4. Konsep Dasar Pengenaan Pajak Daerah	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Dasar-dasar Pengenaan Pajak Daerah terhadap Pegguna Jasa Telekomunikasi	8
2.2. Keseimbangan Umum dan Ekonomi Kesejahteraan	10
2.3. Eksternalitas Barang Publik	15
2.4. Pendekatan Ekonomi Penawaran dan Kurva Laffer	18
2.5. Fungsi Pajak	21
2.6. Peraturan Perundangan yang Melandasi	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Ruang Lingkup Studi	25
3.2. Pengertian Obyek, Subyek, Mekanisme, dan Tarif Pajak Daerah terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi	25
3.2.1. Obyek Pajak	26
3.2.2. Subyek Pajak	27
3.2.3. Mekanisme Pemungutan Pajak	28
3.2.4. Tarif Pajak	34
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	37
3.4. Pengolahan Data	37

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1.	Perkiraan Penerimaan dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi	39
4.2.	Perkembangan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar	40
4.3.	Skenario Penetapan Tarif dan Biaya Pemungutan	43
4.4.	Estimasi Hasil dan Biaya Pemungutan	45
4.5.	Proyeksi Hasil Pemungutan Bersih Tahun 1995 - 2000	50
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	55
5.1.	Kesimpulan	55
5.2.	Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		



Tabel 1	Perkembangan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur Tahun 1990 - 1994	40
Tabel 2	Peranan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur Tahun 1990 - 1994 (<i>dalam persen</i>)	41
Tabel 3	Pertumbuhan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur Tahun 1990 - 1994 (<i>dalam persen</i>)	43
Tabel 4	Skenario Tarif Pajak Daerah terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur (<i>dalam persen</i>)	44
Tabel 5	Skenario Biaya Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur (<i>dalam persen</i>)	45
Tabel 6	Estimasi Hasil Pemungutan dengan Skenario 1 s/d 4 Pajak Daerah atas Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar Tahun 1994	46
Tabel 7	Estimasi Biaya Pemungutan dengan Skenario A s/d D Pajak Daerah atas Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar Tahun 1994	47
Tabel 8	Estimasi Hasil Bersih Pemungutan Pajak Daerah atas Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar Tahun 1994	47
Tabel 9	Sensitivitas Hasil Bersih Pemungutan Pajak Daerah atas Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar	48
Tabel 10	Proyeksi Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur Tahun 1995 - 2000	52
Tabel 11	Proyeksi Hasil, Biaya, dan Hasil Bersih Pemungutan Pajak Daerah atas Pengguna Jasa Telekomunikasi Dasar di Jawa Timur Tahun 1995 - 2000	54

Gambar 1	Diagram Konsep Dasar Pengenaan Pajak Daerah	5
Gambar 2	Struktur Dasar Pengenaan Pajak Daerah terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi	9
Gambar 3	Kurva Laffer	20
Gambar 4	Bagan Hubungan Obyek, Subyek, Mekanisme, dan Tarif Pajak	26
Gambar 5	Bagan Organisasi dan Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Pengumpulan Pajak Jasa Telekomunikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	38



Lampiran 1	Perkembangan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar per UPT/ Daerah di Jawa Timur Tahun 1994	64
Lampiran 2	Peranan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar di UPT/ Daerah - Jawa Timur Tahun 1994 (<i>dalam persen</i>)	65
Lampiran 3	Peranan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Dasar per UPT/ Daerah di Jawa Timur Tahun 1994 (<i>dalam persen</i>)	66
Lampiran 4	Estimasi Hasil Pemungutan dengan Skenario 1 s/d 4 per UPT/ Daerah di Jawa Timur Tahun 1994	67
Lampiran 5	Estimasi Biaya Pemungutan dengan Skenario A s/d D per UPT/ Daerah di Jawa Timur Tahun 1994	69
Lampiran 6	Estimasi Hasil Bersih Pemungutan dengan Skenario 3-B per UPT/ Daerah di Jawa Timur Tahun 1994	71
Lampiran 7	Proyeksi Hasil, Biaya, dan Hasil Bersih Pemungutan per UPT/ Daerah di Jawa Timur Tahun 1995 - 2000	72